

BAB 4

Prolog: Analisis Konvergensi Restrukturisasi Diplomasi Negara *Middle Power* Mantan Anggota DK PBB

Sebelum lebih jauh mengupas mengenai restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia dan bagaimana Indonesia mengarungi teater politik internasional pada forum DK PBB, diperlukan pengetahuan dan analisis terkait konvergensi apa yang menjadi elemen utama dan muatan diplomasi *middle power* yang dilakukan oleh aktor negara. Dalam bab ini, aktor negara yang akan menjadi unit analisis adalah beberapa negara yang memiliki pendekatan mirip/ harmonis secara konteks geopolitik, posisi politik dari level regional, dan bagaimana negara-negara tersebut kemudian melakukan diplomasi berdasarkan kebijakan luar negeri yang telah mereka sesuaikan sebagai negara anggota DK PBB. Penyesuaian dalam hal ini perlu dipahami sebagai suatu upaya restrukturisasi kebijakan luar negeri yang dilakukan masing-masing negara ketika mereka menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Negara yang diambil di sini tentu adalah negara *middle power* dan merupakan aktor dari kelompok kawasan yang dipilih penulis untuk memberikan analisis konvergensi spesifik dan tidak terlalu jauh dari karakter Indonesia sebagai negara yang menjadi bahasan utama dalam penelitian ini.

Adapun area konvergensi tersebut nantinya akan menjadi acuan dalam menjadi perbandingan elemen dan fitur-fitur kebijakan luar negeri yang telah terestrukturisasi dan bagaimana jika dibandingkan dengan proses yang telah dilalui Indonesia dalam hal ini. Selain itu, area konvergensi tersebut diharapkan penulis menjadi temuan-temuan yang dapat menjadi acuan terutama bagaimana negara tersebut mengembangkan poligrinya di tengah bergesernya tatanan tradisional HI dengan isu-isu kontemporer saat ini. Restrukturisasi kebijakan luar negeri yang dilakukan Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap DK PBB (*elected 10/ E-10*) tentu akan ada memiliki area konvergensi dengan negara-negara *middle power* lainnya. Dalam penelitian ini sendiri penulis akan fokus pada tiga kelompok negara yang secara karakter di asumsikan

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

mempunyai kemiripan dengan model kebijakan luar negeri *middle power* Indonesia. Semua negara yang akan dibahas pada bagian ini pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB minimal sekali dan dipilih berdasarkan signifikansi mereka dengan polugri Indonesia. Penulis membagi ke dalam tiga kelompok yaitu: (1) Asia Timur yang terdiri dari Jepang dan Korea Selatan; dan (2) negara anggota ASEAN yaitu Malaysia dan Vietnam. Keempat negara ini tentu memiliki karakter dan klasifikasi model dan peran kebijakan luar negerinya sebagai *middle power* masing-masing sesuai apa yang diklasifikasikan pada studi sebelumnya (Abbondanza, 2022; Akhli, 2019; Anindya, 2016; Cox, 1989; Hidayatullah, 2017; Do, 2022; Krishnan, 2020). Hal ini penulis pandang penting sebagai prolog sebelum memahami *process tracing* dari restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia sebagai *bridge builder* atau pembangun jembatan di DK PBB.

Adapun keperluan dan modalitas untuk menggunakan kelima negara ini sebagai pembanding adalah karena negara-negara *middle power* ini memiliki karakter dan fitur yang beririsan dengan polugri Indonesia. Untuk memahami hal ini, penulis akan menjelaskannya dengan meninjau dua aspek penting yaitu dari segi apa motif/ tujuan suatu negara *middle power* dan bagaimana *middle power* berimplikasi bagi tatanan dan sistem global. Untuk bagian pertama mengenai motif, perlu diketahui ada dua tujuan utama yang dilakukan suatu negara *middle power* dalam sistem internasional yaitu *role conception* atau bagaimana peran suatu negara *middle power* terkonseptualisasi dan *status-seeking* atau mencari jati diri/ status suatu negara yang ingin di peroleh dalam tatanan global yang lebih luas (Karim, 2018). Kemudian untuk bagian kedua, terkait implikasi dari perubahan kebijakan luar negeri *middle power* perlu diketahui bahwa implikasi tersebut dapat menjadi cerminan refleksi ketika melakukan pengkajian/ *process tracing* yang diterapkan Indonesia dalam tatanan multilateral. Adapun dalam hal ini tentu akan dikaitkan dengan konteks yang merupakan muatan dari model restrukturisasi kebijakan luar negeri yang di kemukakan oleh Holsti.

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Sebelum lebih lanjut membedah restrukturisasi negara-negara tersebut, perlu ada pemahaman dasar terkait variabel yang menjadi muatan utama dalam melacak kembali proses restrukturisasi kebijakan luar negeri di DK PBB. Berbagai penelitian sebelumnya telah melakukan kajian terhadap isu ini, dan kasusnya juga sering ditemukan di luar konteks isu *high politics*. Tentunya peran aktif dari para negara *middle power* tersebut menjadi suatu pembahasan yang akan mengarahkan bagaimana restrukturisasi kebijakan luar negeri mereka dilakukan. Adapun menurut model KJ Holsti yang digunakan dalam penelitian ini, ada tiga variabel yang mempengaruhi implikasi dari sebuah proses restrukturisasi kebijakan luar negeri *middle power*. Ketiga elemen yang berpengaruh tersebut dinamakan variabel dependen yang fokus pada intensi suatu aktor dalam melakukan restrukturisasi kebijakan luar negerinya, adapun ketiga elemen dari variabel dependen itu adalah: (1) *disengagement policy* atau bagaimana suatu negara melepaskan dirinya dari suatu kebijakan/ realita yang telah berlangsung dalam dinamika kebijakan luar negerinya. Tidak banyak literatur yang mendefinisikan *disengagement* secara tetap, namun interpretasinya kebanyakan sama yaitu berdasar pada usaha suatu negara untuk menghentikan keberlanjutan suatu kebijakan untuk mengubah realita hubungan luar negerinya sesuai dengan apa yang mereka inginkan, hal ini dikaji dalam berbagai studi. Salah satu studinya adalah dari penelitian Rejeki (2019) yang berfokus pada *disengagement* antara India dan Tiongkok pasca krisis Doklam yang di mana ditandai dengan perjanjian damai kedua negara untuk restorasi perdamaian yang sangat merugikan dari segi perekonomian (Rejeki & Utama, 2019).

Penelitian yang dikaji oleh Quero dan Dessi (2021) juga mengelaborasi bahwa *disengagement* maupun antonimnya *engagement* merupakan perwujudan arah intervensi kebijakan yang dilakukan terhadap suatu *status quo* hubungan luar negeri yang dinilai disruptif terhadap kepentingan suatu aktor. Dalam hal ini *engagement* dan *disengagement* menjadi bagian intervensi dari level yang lebih rendah namun bersifat selektif, yang di mana contoh studi kasus yang dipakai adalah polugri Amerika Serikat

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

(AS) yang melakukan *disengagement* pada konflik Isis, Tunisia, Yaman, dan Israel Palestina pada beberapa kejadian (Quero & Dessi, 2021); (2) Aksi restrukturisasi kebijakan luar negeri di lingkungan eksternal suatu negara. Hal ini menjadi salah satu elemen penting yang menjadi variabel dependen ketika menganalisis restrukturisasi kebijakan luar negeri. Adapun upaya restrukturisasi yang dilakukan di lingkungan eksternal tersebut juga dimungkinkan dipengaruhi oleh penetrasi budaya, interdependensi ekonomi, maupun ketergantungan terhadap suatu aktor di lingkungan eksternal sebuah negara (Holsti, 1982); (3) Aksi yang dilakukan negara dalam menanggapi penetrasi aktor eksternal, yang di mana hal ini sudah sangat jelas, baik penetrasi dalam konteks perekonomian, di mana para aktor negara mengalami penetrasi yang diakibatkan oleh investasi asing, hutang, dan bantuan pembangunan (*Official Development Assistance/ ODA*) (Richards, Gelleny, College, & Sacko, 2001).

Namun, tidak hanya pada contoh ekonomi, penulis berpikir bahwa penetrasi asing juga merupakan suatu kelaziman yang terjadi dalam konteks politik dan keamanan internasional. Hal ini tentunya tidak serta merta karena penetrasi asing menanamkan pengaruh, tetapi juga berdampak pada dinamika kepentingan negara yang berperan penting dalam rezim keamanan global seperti DK PBB. Penetrasi asing akan menyebabkan adanya gesekan gesekan yang mungkin terjadi sehingga membuat suatu negara terutama negara P5 di DK PBB akan mengubah sikapnya dan merespons penetrasi asing yang terjadi tersebut, Seperti contoh ketika sebuah negara memiliki hutang yang besar dengan *major power* tertentu, maka apabila ada usulan kerja sama pakta pertahanan, hal itu bisa jadi ditanggapi secara positif oleh negara yang memiliki hutang dengan pikiran rasional mereka, dan bahkan dengan asumsi juga bahwa suatu negara akan merubah struktur kebijakan luar negeri bilateralnya dengan negara *major power* tersebut. Contoh besarnya adalah bantuan Tiongkok yang terus menerus terinvestasikan ke Kepulauan Solomon yang berujung pada penandatanganan pakta keamanan bilateral kedua negara pada April 2022 (Castagnone, 2022).

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Walaupun rivalitas antara AS dan Tiongkok di Indo Pasifik memang tidak pernah di bahas di DK PBB, namun ada artian penting, yaitu situasi geopolitik antar kedua negara akan terus mempertajam atau memperdalam derajat perbedaan kepentingan yang di mana tidak akan terjadi *confidence*. Penulis beranggapan bahwa hal ini sangat lazim karena penetrasi asing contohnya dalam kasus ini, dapat digunakan sebagai basis justifikasi atas suatu tindakan unilateral yang bisa saja berpotensi menghambat pencapaian perdamaian dan keamanan internasional. Contoh lainnya di DK PBB adalah ketika kelompok negara Barat mengusulkan rancangan resolusi untuk intervensi militer di Libya yang disetujui oleh DK PBB tanpa veto, dan kemudian dilakukan operasi militer untuk meruntuhkan Ghadafi dan di waktu bersamaan berusaha untuk membangun blok kekuatan solid karena negara saingan geopolitiknya seperti dari kelompok Timur melakukan penetrasi dengan membangun kelompok proksi yang ditujukan untuk melawan kekuatan yang di dukung oleh restu DK PBB dan lain – lainnya yang tidak dapat dijelaskan lebih lanjut pada bagian ini agar tidak memperlebar konteks.

Disimpulkan dari penjelasan di atas, bahwa ketiga variabel tersebut merupakan hasil dari proses pembentukan intensi para aktor itu tersendiri yang tidak lepas dari keinginan internal maupun kondisi lingkungan eksternal. Ada sebuah keterkaitan dengan proses diplomasi multilateral yang dilakukan di DK PBB berdasarkan penelitian sebelumnya. Berikut ini akan dibedah beberapa negara yang disebutkan di atas berdasarkan kelompok regionalnya masing-masing. Penulis melihat bahwa ada berbagai titik konvergensi dan pola yang dapat menjadi dasar yang cukup kuat dalam melacak dan mengkaji proses restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia sebagai *middle power* pada DK PBB. Penelitian ini lebih lanjut akan menggunakan model analisis *process tracing* dalam mencari temuan-temuan nilai konvergensi tersebut. Penulis akan mulai dari peninjauan bagaimana jejak negara tersebut dan sudah berapa kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB, apa saja prioritas kebijakan yang diusung dalam keanggotaannya, dan kontribusi apa yang tercapai selama keanggotaan mereka

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

berlangsung. Adapun dari sini kemudian juga kembali dikaji penyesuaian apa yang dilakukan dan bagaimana penulis menganalisis hal ini untuk dikaitkan dengan kontribusi/ *deliverable* dari keanggotaan mereka selama menjadi anggota tidak tetap DK PBB.

A. Process Tracing Resrukturisasi Kebijakan Luar Negeri Middle Power Antar Negara Pembanding Mantan Anggota Tidak Tetap DK PBB

Seperti yang dibahas sebelumnya, akan ada dua kelompok utama yang akan dikaji karena kedua kelompok kawasan ini memiliki kemiripan dengan gambaran garis besar dari pada restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Adapun dua kelompok ini adalah Asia Timur yang di dalamnya akan dijelaskan dari perspektif Jepang dan Korea Selatan serta kelompok negara Asia Tenggara (ASEAN) yang akan di jelaskan dari perspektif Malaysia dan Vietnam. Kedua kelompok ini akan penulis konstruksikan berdasarkan panduan pertanyaan kunci yaitu bagaimana mereka melakukan restrukturisasi kebijakan luar negeri dan apa saja *key takeaways* yang bisa di ambil dalam proses mereka sebagai mantan anggota tidak tetap DK PBB.

1. Studi Kasus Kelompok Asia Timur: Jepang dan Korea Selatan

Jepang dan Korea Selatan dalam hal ini adalah dua negara yang memiliki posisi mirip dengan karakteristik diplomasi *middle power* Indonesia di kawasan. Kedua negara ini juga merupakan negara yang sudah pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB dan secara aktif memiliki prioritas isu keamanan dan perdamaian global yang menjadi perhatian kedua negara. Faktor dan elemen yang mempengaruhi restrukturisasi kebijakan luar negeri kedua negara di forum multilateral memberikan kesimpulan penting akan pentingnya penciptaan ruang otonomi untuk suatu negara dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya.

a. Jepang

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Jepang merupakan suatu negara *middle power* yang saat ini sudah sepuluh kali terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB, dan baru-baru ini dikabarkan bahwa pada tahun 2022 Jepang akan kembali mencalonkan dirinya menjadi anggota tidak tetap DK PBB (E-10) untuk kesebelas kalinya. Orientasi diplomasi multilateral Jepang di PBB sendiri dalam isu perdamaian dan keamanan internasional dimulai melalui proses negosiasi norma dan regulasi transfer dan penggunaan senjata konvensional serta adopsi *UN Register of Conventional Arms* (UNRCA) (Yasutomo & Ishigaki, 2017). Dalam isu UNRCA, Jepang sendiri pada saat itu di era tahun 1990-an telah menempatkan PBB sebagai salah satu pilar penting diplomasi pasca perang dingin dan terus mendorong kerja sama dan norma internasional dalam bidang *peacekeeping* dan keamanan manusia. Namun, diplomasi multilateral Jepang pada era tersebut dalam konteks posisi nasionalnya masih dipengaruhi oleh tekanan AS, sehingga struktur dari kebijakan luar negeri Jepang di PBB masih bersifat reaktif dan *activism* atau keaktifan diplomasi multilateralnya masih diarahkan oleh *US – Japan Strategic Framework* (Drifte, 2000). Pengaruh eksternal dari AS menjadi salah satu faktor utama yang mendorong Jepang untuk melakukan perubahan dan penyesuaian akan kebijakan dan posisi yang diambilnya dalam melaksanakan politik luar negeri negara tersebut sebagai salah satu tekanan dari AS untuk Jepang bertindak sebagai aliansi AS dengan ruang otonomi pengelolaan kebijakan luar negerinya yang sangat kecil. Namun, status quo realita diplomasi multilateral Jepang tersebut tidak bertahan lama, kurang lebih pada di atas tahun 1990-an, Jepang di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Fukushima Aiko terus mendorong diplomasi Jepang yang lebih proaktif dan tidak hanya reaktif (Yasutomo & Ishigaki, 2017). Walaupun demikian, dari studi kasus yang terjadi terkait usaha Jepang dalam proses multilateral *Arms Trade Treaty* (ATT), Jepang sendiri sebagai negara yang masih membangun politik proaktifnya masih menghadapi tantangan. Tantangan yang di maksud mencakup bagaimana tidak adanya kepemimpinan politik Jepang dalam otonomi diplomasinya membuat integrasi isu-isu internasional dalam konteks yang lebih relevan masih terhambat secara umum

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

walaupun akar diplomasi pasifis Jepang masih tertanam (Drifte, 2000; Yasutomo & Ishigaki, 2017).

Narasi yang terbangun ketika memahami proses kebijakan luar negeri Jepang selain memperdalam terkait bagaimana negara ini bertransformasi dari negara kalah perang menjadi negara yang aktif mempromosikan perdamaian dunia bersama barat juga harus memerhatikan bagaimana Jepang membangun kebijakan luar negeri dan reorientasi/ restrukturisasi apa yang dilakukan. Tentunya hal ini tidak lepas akan konteks yang di bahas sebelumnya, yaitu bagaimana faktor AS sebagai negara yang memegang erat Jepang terus menjadi “intervensi” dalam proses kebijakan luar negeri Jepang. Untuk catatan, pada 9 Juni 2022 Jepang sendiri resmi terpilih kembali menjadi anggota tidak tetap DK PBB, hal ini merupakan salah satu pencapaian baik, namun bukan bentuk sesuatu visi yang telah dibahas dan dicanangkan. Jepang sendiri seperti kita ketahui sering di bahas untuk menjadi anggota tetap DK PBB. Jepang sendiri menggunakan basis argumen bahwa negara mereka sudah berkontribusi cukup banyak terhadap arsitektur perdamaian global melalui kontribusi konkret pasukan perdamaian, bantuan luar negeri, dan dukungan kuat dalam pengendalian senjata pemusnah massal dan non – proliferasi nuklir (O’Hanlon, 1996). Namun, walaupun hal ini sudah di cita-citakan sejak lama, kondisi saat ini dan situasi global sepertinya belum memberikan ruang karena penambahan anggota tetap DK PBB memerlukan pembahasan kompleks yang sarat akan muatan politis.

Kembali kepada konteks Jepang, perlu di ketahui bahwa negara Asia Timur ini memiliki ancaman nyata di depan mata mereka yaitu Korea Utara dan Tiongkok. Jepang memiliki posisi yang cukup unik di mana mereka tidaklah membangun aliansi yang kuat dengan negara “rival” tradisional mereka yaitu Korea Selatan. Dimulai dari isu Korea Utara, Jepang sendiri tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Korea Utara, yang di mana posisi ini sangat kental dengan muatan kebijakan “*non recognition*” yang diterapkan AS terhadap Korea Utara. Jepang dalam hal ini menjadi negara yang juga mempengaruhi dinamika ambisi Pyongyang untuk menyatukan

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Semenanjung Korea. Jepang sempat berminat untuk membantu Korea Utara dengan kebijakan yang lebih akomodatif untuk memfasilitasi pengenalan akan “sistem dan tata kelola internasional” yang bermanfaat untuk Korea Utara, namun hal ini di pandang sebagai ancaman oleh Korsel mengingat uang dan bantuan yang diberikan berpotensi kontra produktif dan malah meningkatkan proliferasi nuklir Korut. Pada akhirnya hingga hari ini, status quo kebijakan *non recognition* tersebut masih bertahan, masih intensnya operasi penculikan, intelijen, dan tidak adanya normalisasi hubungan bilateral membuat posisi Jepang pada isu Korut masih di setir oleh modalitas kebijakan yang disusun oleh suatu negara eksternal. Dapat disimpulkan, bahwa setelah elemen otonomi di bahas, muncul suatu kepentingan untuk membahas bagaimana konfigurasi kebijakan dapat dilakukan

Walaupun demikian, Jepang masih memiliki ruang otonomi yang cukup karena Jepang bisa melakukan desain *patron engagement policy* (kebijakan keterlibatan Jepang sebagai “pelindung”) di kawasan. *Patron engagement policy* sendiri di kenal sebagai suatu keterlibatan negara yang dapat diukur melalui penjaminan keamanan terhadap sekutunya, efektivitas komitmen di luar hal retorik, dan kelanjutan kehadiran militer di kawasan. Jepang dalam hal ini sendiri dengan militernya yang terbatas walaupun Jepang di batasi dan masih terikat dengan kemitraan bilateral Jepang – Amerika Serikat yang mencakup isu pertahanan secara mendalam. Beberapa studi juga membahas faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kebijakan luar negeri Jepang dalam isu keamanan, dalam hal ini penulis mengidentifikasi ada dua kajian tekstual. Pertama, Jepang mengubah kebijakan luar negerinya berdasarkan faktor rasionalisasi kebijakan yang realis melalui penguatan pertahanan dan kemitraan dengan AS dan kontradiksi dari postur kebijakan ini adalah perubahan kebijakan luar negeri akibat dari faktor liberal yang mendorong multilateralisme dan promosi kerja sama (Cornelis, 2010). Kedua, evolusi kebijakan keamanan Jepang dalam hubungan luar negerinya lebih fokus pada muatan pasal 9 dari konstitusi Jepang yang secara terus menerus di

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

interpretasikan sebagai kebijakan luar negeri yang anti akan militerisasi dan keinginan untuk terus proaktif dalam tata kelola keamanan internasional (Anindya, 2016).

Dari hal-hal tersebut, ada beberapa poin yang bisa di tarik dari posisi domestik dan situasional geopolitik Jepang untuk di kaitkan dalam kerangka pemikiran untuk membangun perspektif bagaimana proses Jepang melakukan restrukturisasi kebijakan luar negerinya di DK PBB. Secara historis, kajian sebelumnya menunjukkan bahwa Jepang membuat indikatornya sendiri untuk menentukan apakah sesuatu kebijakan lama masih bisa di pertahankan atau harus diubah. Jepang dinilai mengalami restrukturisasi kebijakan luar negeri di mulai pada akhir perang dingin dan munculnya perang Teluk namun di waktu bersamaan tidak mengubah perspektifnya terhadap AS. Indikator ini masih cukup relevan mengingat posisi seperti ini disebut sebagai *gaiatsu* atau adanya kehadiran tekanan aktor asing terhadap Jepang (Cooney, 2007). Namun, walaupun dijelaskan demikian penelitian tersebut juga membahas empat agen utama yang berkontraksi saat Jepang melakukan perubahan dalam struktur kebijakan luar negerinya: (1) Ketegasan pemimpin Jepang sebelumnya (era Miyazawa); (2) advokasi birokratis yang mengubah kelompok birokrat yang umumnya resistensi terhadap perubahan kemudian menerima perubahan dan mendukungnya; (3) restrukturisasi domestik yang bergantung pada suatu segmen politik nasional; dan (4) situasi eksternal/ *external shock* (Cooney, 2007).

Ada beberapa poin yang bisa ditarik untuk menjadi acuan analisis konvergensi yang dapat menjadi pembahasan bab berikutnya daripada penelitian ini. Poin pertama, Jepang bergantung pada kekuatan hegemon besar yang secara institusional dan sistemik sudah menjadi darah dan daging kebijakan politik luar negeri Jepang. Seperti di bahas sebelumnya, hal ini menjadikan Jepang sebagai negara dengan otonomi kebijakan luar negeri yang terbatas karena pertimbangan akan setiap keputusan yang di ambil harus tetap menjaga hubungan dengan AS. Keterbatasan konstitusional Jepang untuk melakukan ekspansi militer dan meningkatnya situasi keamanan di kawasan membuat Jepang harus berpartisipasi juga pada inisiatif minilateral seperti

Hino Samuel Jose, 2022
***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Quadrilateral Security Dialogue (Quad). Poin kedua, selain daripada ruang otonomi kecil dan adanya ketergantungan dari tekanan dan kehadiran aktor asing, perlu di ketahui situasi politik di Jepang saat ini belum memberikan lingkungan yang ideal serta secara historis hal ini juga di pengaruhi oleh kehadiran partai Demokrasi Liberal (LDP) di Jepang (Rosenbluth & Thies, 2010). Poin ketiga, Jepang berkontribusi kepada perdamaian dunia melalui kontribusinya pada operasi PBB namun dalam kebijakan luar negerinya Jepang sendiri melakukan perubahan dan memberi ekspektasi terhadap tata kelola keamanan perdamaian global di PBB. Hal ini ditandai dengan Jepang terus mencari kesempatan agar ada sesuatu hal yang lebih besar secara bilateral hingga multilateral terutama dalam memperbaiki arsitektur dan perencanaan kebijakan perdamaian PBB bisa sesuai dengan mekanisme yang menjadi ekspektasi Jepang ketika berkontribusi pada resolusi konflik dan misi perdamaian preventif (Inoguchi, 1995).

Poin ke empat, restrukturisasi kebijakan luar negeri Jepang sendiri juga dilakukan secara eksternal dan *outward looking* di mana Jepang bersama negara G4 yaitu India, Brazil, dan Jerman secara bersama mengajukan model DK PBB yang baru walaupun pada akhirnya inisiatif ini belum berhasil hingga sekarang (Rolf, Janssen, & Liedtke, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa Jepang terus bekerja lebih ekstra ketimbang negara lain dan melakukan penjemputan bola terhadap potensi yang ada. Proposal perluasan keanggotaan DK PBB yang diajukan oleh G4 ini sendiri kurang berjalan untuk Jepang karena ada persaingan antara Jepang dan Jerman untuk memperoleh dukungan hangat dari Amerika Serikat sambil di bayang-bayangi oleh blokade Rusia dan Tiongkok. Poin kelima, saat ini terjadi beberapa perubahan struktur kebijakan luar negeri Jepang yang bisa dianalisis dari apa yang terjadi pada keanggotaan Jepang di DK PBB tahun 2023 – 2024 yang sebelumnya Jepang telah memenangkan pemilihan umum mewakili kelompok kawasan pada 9 Juni 2022.

Lebih lanjut, dalam publikasi Kementerian Luar Negeri Jepang pada tahun 2022 sebagai bagian dari kampanye mereka, Jepang menyadari betul pentingnya

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

sinergi antara situasi rivalitas geopolitik dan apa yang perlu mereka dorong pada tatanan global melalui beberapa prioritas: (1) Mendorong kerja sama pembangunan dan keamanan manusia, yang di mana hal ini sebagai aksi kebijakan luar negeri yang berat pada aspek pembangunan manusia, yang terus juga di kedepankan oleh Tiongkok. Jepang sadar bahwa untuk meningkatkan pengaruh, dunia tidak lagi bergantung pada narasi yang menjurus pada ideologi seperti apa yang terjadi pada perang dingin. Melainkan, kerja sama konkret pembangunan penting dilakukan untuk menghadirkan negara mereka dan sebagai kekuatan politik untuk menjaga suatu negara agar tidak di gapai oleh penetrasi geopolitik kekuatan rivalnya. Dalam hal ini kita tahu, bahwa Jepang bersama anggota Quad terus berusaha untuk menyeimbangkan kehadiran Tiongkok di Indo Pasifik baik di Asia Tenggara (bersama ASEAN) dan Pasifik Selatan (bersama negara anggota *Pacific Island Forum/ PIF*), Jepang menempatkan dalam dokumen Kementerian Luar Negerinya dua aktor utama yaitu PIF dan ASEAN sebagai contoh yang menjadi elaborasi prioritas Jepang untuk memajukan agenda pembangunan dan keamanan manusia di DK PBB melalui keanggotaannya.

Terkait hal ini, sebelumnya disinggung oleh penelitian yang menekankan bahwa Jepang dan Tiongkok terus berlomba untuk mengambil alih kepemimpinan politik dan ekonomi di kawasan melalui institusi regional mitranya masing – masing dan terus bersaing, terutama juga pada mekanisme pendanaan multilateral yang terus ditujukan agar tidak kalah saing dengan Tiongkok (Yoshimatsu, *New Dynamics in Sino-Japanese Rivalry*., 2018); (2) Jepang juga terus memperkuat prioritas mereka untuk menjadi arsitek yang berkontribusi dalam pembangunan tatanan internasional yang berlandaskan aturan (*rules-based*), hal ini sendiri sudah terus menjadi perhatian Jepang, yang di mana pada publikasi Kemlu Jepang juga menekankan pentingnya intensitas kebebasan navigasi, perdagangan bebas, dan penghormatan pada hukum internasional termasuk pada cakupan non tradisional seperti ruang siber dan ruang angkasa, serta mendorong HAM dan investasi berkualitas. Hal ini sangatlah non tradisional apabila segelintir kita pandang dalam kaca mata kerangka normatif DK PBB

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

yang erat pada isu keamanan tradisional dan konflik antar bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa Jepang mulai melakukan sinergi antara isu kawasan dan isu global yang akan menjadi prioritas pandangannya di DK PBB selama tahun 2023 hingga 2024.

Tentunya dalam konteks DK PBB, posisi Jepang selama menjadi anggota tidak tetap di DK PBB akan terus mendukung dan sinergis dengan AS sebagai salah satu anggota tetap P5 dengan hak veto. Realita pahit saat ini adalah pemerintahan Jepang belum bisa untuk saat ini dan beberapa tahun kedepan untuk mengajukan kembali keanggotaan mereka sebagai anggota E-10 DK PBB. Proposal G4 yang diajukan tentunya bukanlah suatu hal yang menarik untuk para *major power* sehingga realita tersebut harus di terima oleh Jepang di mana mereka tidak bisa menjadi anggota tetap DK PBB. Namun dalam kaca mata analisis kebijakan luar negeri, perlu di ketahui bahwa *role conception* yang di miliki Jepang sendiri, yang di *benchmark* oleh kehadiran *East Asian Community Initiative* di tengah ketergantungan mereka dengan apa yang di posisikan oleh AS dalam tatanan global, menunjukkan bahwa Jepang juga berminat untuk melakukan perubahan struktur kebijakan luar negeri mereka sedemikian rupa yang merupakan tujuan Tokyo untuk menciptakan *dual role* dalam posisi mereka di tatanan multilateral secara keseluruhan untuk mengurangi ketergantungan mitra eksternal dan menciptakan kemandirian melalui rezim yang terbuka dan konstruktif, sambil mempertahankan posisi pragmatis melalui integrasi desain kerangka institusional AS di kawasan Asia Timur (Yoshimatsu, 2018). Hal ini menjadi ciri Jepang sebagai *middle power* yang menurut penulis merefleksikan posisi mereka sebagai *assembler*. Penulis percaya bahwa posisi Jepang sebagai *assembler* dalam hal ini akan mempengaruhi dinamika mereka dalam pembahasan DK PBB.

Contoh konkret yang bisa di ambil dalam penelitian ini ini adalah posisi Jepang yang terus mendorong fungsionalitas DK PBB dalam isu proliferasi nuklir Korea Utara yang secara bersamaan juga mereka menegaskan keinginan mereka untuk proaktif dan mendorong perlindungan nilai norma universal akan perdamaian (MOFA Japan, 2022).

Jepang sambil di lain kesempatan bekerja sama dengan AS untuk memperoleh

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dukungan politik dalam posisi mereka pada pertemuan US – Japan Leaders Meeting pada tahun 2022 di mana Biden sepakat untuk mendorong keanggotaan Jepang di tengah urgensi reformasi DK PBB (Aljazeera, 2022). Namun untuk menjadi *assembler* yang dapat menghimpun kekuatan dan peran *middle power* dalam tatanan internasional akan terhambat, apabila Jepang masih mendapat stereotip sebagai sekutu kuat AS, sehingga *dual role* dapat di pandang sebagai upaya Jepang untuk mengurangi kentalnya stereotip ini pada politik luar negerinya. Seperti di ketahui bahwa Jepang yang pada saat itu sebagai anggota G4 mengajukan dirinya sebagai anggota P5 dinilai oleh Korea Utara sebagai tambahan satu voting dukungan terhadap AS yang terus melecehkan keamanan global, hal ini diutarakan oleh Korea Utara, serta di tambah dengan penolakan dari Korsel yang bergabung pada aliansi *Uniting for Consensus* yang memiliki posisi kontra dengan G4 (Kurniawati E. , 2014).

Namun masih ada optimisme yang terus penulis tegaskan dalam hal ini, di mana Jepang sebagai *assembler* yang penulis diskusikan dalam bagian ini, mempunyai modalitas yang cukup kuat karena Jepang merupakan negara yang mempunyai keterbatasan militer sehingga paradigma kebijakan mereka sebagai *middle power* akan lebih liberal sambil menahan diri mereka untuk tidak melakukan intervensi pada area – area sensitif. Contohnya, pada isu Palestina – Israel, Jepang cenderung tidak terlalu vokal namun masih memberikan pandangan normatif akan pentingnya de-eskalasi dan secara konkret memberi bantuan kepada Palestina melalui *Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development* (CEAPAD) dan tidak sangat vokal dalam isu keamanan dan hanya memperhatikan dari segi pembangunan. CEAPAD merupakan mekanisme yang menjadi tempat bagi para *middle power* seperti Indonesia, Jepang, Thailand, dan negara – negara anggota forum tersebut untuk membahas pemberian bantuan kepada Palestina ketimbang sebagai forum dengan muatan muatan kecaman terhadap Israel maupun forum yang digunakan untuk proliferasi sentimen pro Barat dan sebagainya.

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Jepang masih bermain aman, dan penulis melihat masih akan terus mempertahankan postur tersebut dalam jangka panjang. CEAPAD juga digunakan Jepang untuk mengasingkan Tiongkok dalam hal ini, sehingga juga menurut studi sebelumnya merupakan bentuk penyesuaian kebijakan luar negeri Jepang untuk mempertahankan pendekatan rivalitas strategis yang asimetris namun masih mempertahankan posisi forum CEAPAD sebagai alat koordinasi untuk menghimpun bantuan (Schulze, 2019). Hal ini tentu merupakan salah satu manifestasi peran Jepang sebagai *middle power* yang di klasifikasikan sebagai *enforcer*.

Dari pembahasan tersebut, untuk kesimpulan, ada beberapa nilai konvergensi yang dapat kita perhatikan, di mana Jepang sendiri dalam hal ini terus membangun perannya sebagai *assembler* yang dalam hal ini sebagai salah satu perpanjangan tangan kebijakan luar negeri *dual role* untuk meningkatkan ketahanan diri dan kemandirian Jepang tanpa harus bergantung pada kemitraan dengan AS. Namun seperti yang diketahui, bahwa hal ini akan tarik ulur dengan apa yang terjadi dalam level domestik, di mana partisipasi Jepang dan revitalisasi aliansi mereka dengan negara barat pada isu prioritas keamanan tradisional akan terus bergantung pada pengaruh kelompok nasionalis domestik yang terus menuntut perluasan pengaruh Jepang dalam tatanan internasional yang di mana hal ini kemudian berubah menjadi preferensi kebijakan luar negeri *middle power* Jepang secara de facto (Soeya, 2006). Masa depan Jepang sebagai suatu negara *middle power* juga akan menghadapi empat kemungkinan, yang akan terus mempengaruhi proses restrukturisasi kebijakan luar negerinya dalam seluruh lini termasuk dalam DK PBB.

Studi sebelumnya memang mengelaborasi empat skenario masa depan, namun penulis hanya akan mengelaborasi satu – satunya yang paling relevan dengan penelitian ini, yaitu akan terciptanya difusi kekuatan, penerimaan keberagaman dalam tatanan global yang multipolar, dan peningkatan kontra akan hegemoni global yang akan terus bergerak secara dinamis dalam tatanan normatif dari politik luar negeri Jepang di DK PBB (Cox, 1989). Penulis berpendapat lebih dalam, bahwa Jepang akan

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

terus menjadi negara *middle power*, dalam lima hingga sepuluh tahun kedepan, dalam suatu posisi normatif yang masih *contested* namun dengan fusi kepentingan baru, yaitu untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan. Isu Korea Utara dan operasi bina damai akan terus menjadi konteks yang relevan kedepan.

b. Korea Selatan

Korea Selatan adalah negara yang cukup unik untuk dikaji dalam konteks DK PBB, negara ini mempunyai karakter umum yang di pahami kaum awam dan kaum pengkaji studi HI di mana Korsel bergantung pada Amerika Serikat namun mempunyai identitas sebagai *middle power* yang lebih kuat sentimennya ketimbang Jepang. Hal ini sendiri menurut penulis dikarenakan Korea Selatan merupakan negara *middle power* yang berbatasan langsung dengan ancaman serius dari Korea Utara yang mencakup bayang – bayang ancaman nuklir maupun invasi langsung. Berbeda dengan Jepang yang menurut penulis, walaupun juga menghadapi ancaman yang sama dari Korea Utara, namun Jepang juga menaruh derajat rivalitas yang cukup serius terhadap Tiongkok karena Jepang memiliki pendekatan yang lebih asertif dan agresif melalui Quad. Korea Selatan dalam hal ini, masih menaruh pendirian strategis terhadap isu Tiongkok mempertimbangkan bahwa setiap sentilan yang masuk ke Tiongkok dari Korsel akan menghilangkan irisan posisi yang selama ini di kumandangkan oleh Tiongkok sebagai anggota tidak tetap di DK PBB terkait isu proliferasi nuklir Korut.

Perlu di ketahui bahwa Tiongkok sendiri juga merasa bahwa proliferasi nuklir Korut bukanlah sesuatu yang baik sehingga dalam berbagai pertemuan Tiongkok tidak melakukan veto pada pertemuan DK PBB terhadap resolusi yang dipimpin oleh kelompok barat untuk menekan laju dan ambisi nuklir Korut (seperti pada resolusi terkait sanksi DK PBB, perpanjangan mandat panel ahli isu Korut di PBB, dan lainnya). Hal ini membuat Korsel tentu berpikir menurut penulis, bahwa tidak ada untungnya mereka melakukan derajat *balancing* seperti apa yang dilakukan Jepang terhadap Tiongkok karena mereka membutuhkan status Beijing dan dukungan mereka untuk

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

mendukung denuklirisasi dan non-proliferasi Korut. Walaupun dalam hal ini sebenarnya, studi sebelumnya menganggap bahwa situasi geopolitik saat ini memberikan dilema pada Tiongkok terkait isu Korea Utara, di mana meningkatnya asersi AS untuk meraih tahta pengaruh di Indo Pasifik di satu sisi juga memberikan posisi yang sulit untuk Tiongkok dalam isu Korea Utara (Zhao, 2020; Kim D. , 2020). Hal ini dikarenakan Tiongkok adalah pemasok utama Korut namun tetap prihatin pada proliferasi nuklir Korut yang tidak pasti dan cenderung berbahaya untuk Asia Timur, serta kebutuhan untuk menghimpun sekutu melawan asersi AS di Asia Timur dan Indo Pasifik secara keseluruhan yang dibantu oleh Jepang sebagai “pos” politik AS di kawasan dekat dengan Tiongkok. Tentu hal ini bisa dikatakan sebagai dilema Tiongkok terkait kepentingan jangka panjang dalam isu proliferasi nuklir Korut dan kepentingan geopolitik jangka pendek menjadi sangatlah kompleks dengan peningkatan tindakan provokatif yang semakin intens (Zhao, 2020).

Korea Selatan dalam hal ini merupakan negara *middle power* yang terus menjaga posisi aman, dan kepentingan mereka di forum multilateral seperti yang menjadi fokus pada penelitian ini, yaitu DK PBB, di pengaruhi pada kepentingan unilateral mereka. Penulis menilai untuk sementara menjadi hipotesis bahwa perubahan struktur dan orientasi kebijakan luar negeri Korea Selatan sebagai anggota tidak tetap DK PBB hanya akan terjadi apabila ada perubahan terkait posisi bilateral Korseul dengan Korut, apakah Korseul akan mengambil pendekatan konstruktif atau secara asertif. Perbedaan ini mulai tercermin pada pemerintahan Moon Jae In dan Yoon Seok Youl, di mana Presiden Moon lebih mendekati Korut dengan tangan terbuka dan secara simbolis membangun kepercayaan strategis, serta menaruh unifikasi Korea menjadi suatu prioritas, berbeda dengan Yoon yang lebih konservatif dan dari sentimen unilateralnya belakangan ini. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan derajat konflik dengan Korut yang di susul baru – baru ini pasca era Moon, dengan peluncuran 31 kali peluncuran uji coba rudal nuklir yang membuat tensi naik (Brunnstrom & Lewis, 2022).

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Dalam isu Korut contohnya, perubahan dan perbedaan posisi Korsel serta dinamika apakah Seoul semakin agresif ataupun lebih submisif pada proses perdamaian/ denuklirisasi Semenanjung Korea di temukan pada beberapa area yang dapat menjadi acuan analisis konvergensi pada penelitian ini. Pertama, perubahan struktur kebijakan luar negeri Korsel bisa terjadi dan berubah karena di pengaruhi oleh perdebatan politik dalam negeri antar partai yang membuat kekentalan muatan partisan dalam isu ini sangat kuat (Kim D. , 2020). Contohnya adalah perdebatan antara kelompok konservatif di Korsel yang terus menuntut pemerintahan Moon Jae In untuk lebih tegas pada Korut karena mereka tidak bisa sepenuhnya bergantung pada kehadiran AS di *Demilitarized Zone (DMZ)* dan *United States 7th Fleet* yang merupakan angkatan yang hadir di kawasan Asia Timur sebagai kekuatan ekspedisi AS. Kedua, posisi Korsel sendiri dalam konteks restrukturisasi kebijakan luar negerinya sebagai negara *middle power* juga di pengaruhi dari bagaimana Korsel menyelesaikan/ mencari sinergi secara langsung dengan lawannya secara bilateral tanpa ada hadirnya pihak ketiga dalam mekanisme bilateral tersebut. Studi sebelumnya menjelaskan terkait pendekatan pemerintahan Korsel secara langsung ke Korea Utara melalui mekanisme *Inter Korean Summit*, yang di mana apabila terjadi kesepakatan bilateral terkait jaminan keamanan dan non proliferasi nuklir, akan berpengaruh langsung pada kuat dan renggangnya hubungan bilateral Korsel dengan AS dalam isu nuklir. Rasional dari hal ini menurut penelitian tersebut adalah apabila ada jaminan denuklirisasi yang lebih kuat dari Korut tanpa adanya intervensi AS, maka aliansi Korsel dan AS akan mungkin untuk melemah (Nam, 2019). Tentunya hal ini menurut penulis merupakan suatu keniscayaan karena untuk apa Korsel tetap mempertahankan derajat rivalitas yang tinggi terhadap Korut sebagai *bandwagoning* pada posisi AS apabila Korut lebih nyaman untuk bernegosiasi dengan Korsel.

Walaupun demikian, memang perubahan struktur pendekatan Korsel terhadap Korut ini akan terjadi apabila pemerintahan yang berkuasa lebih proaktif dalam pendekatan konstruktif pada era Presiden Moon Jae In ketimbang pada era asertif yang

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

sekarang ini ditekan oleh Presiden Yoon Seok Yeoul. Sedangkan aspek ketiga yang bisa di pahami dalam restrukturisasi kebijakan luar negeri Korsel adalah, bagaimana Korsel dari waktu ke waktu semakin menyadari identitas *middle power* yang termanifestasikan dalam orientasi kebijakan luar negeri mereka. Hal ini secara substansial juga berkaitan dengan *role conception* yang di bahas pada bagian sebelumnya dalam bab penelitian ini. Dalam hal ini pada poin ketiga, Korsel tentu melakukan restrukturisasi kebijakan luar negerinya dengan cara yang lebih optimis dan sadar akan keterbatasannya sebagai *middle power* sehingga internasionalisasi kerja sama dan kepemimpinan Korsel harus ditingkatkan untuk dapat memobilisasi muatan politik dan kerja sama untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi. Hal ini terwujud dalam proses regionalisasi isu prioritas yang mencakup juga dorongan multilateralisme dalam penyelesaian masalah dan konflik, dan menghindari tindakan unilateral dan lebih menggunakan tekanan dan pengaruh dari pihak lain untuk menghadapi ancaman/ keterbatasan mereka. Contohnya adalah, Korsel akan terus mendorong DK PBB untuk menghentikan proliferasi nuklir Korea Utara, mengajak para negara besar untuk menerapkan sanksi dan insentif kepada Korut, ketimbang melakukan tindakan militer unilateral langsung terhadap Korut. Adapun studi sebelumnya juga membahas hal ini, di mana contohnya adalah ketika Korsel mendorong Tiongkok dan AS dalam *Six Party Talks* untuk mendorong denuklirisasi Korut dan terus mengajak agar aktor lainnya memberi tekanan dan terus mendorong mekanisme regionalisasi dan multilateralisasi seperti *Inter Korean Summit* untuk mengajak dialog Pyongyang sebagai cara komplementer terhadap respons kebijakan luar negeri AS (Jongryn, 2016). Sedangkan ke empat, kebutuhan Korsel untuk menjalin kerja sama dengan *likeminded countries* yang umumnya berstatus mirip dengan Korsel yaitu para negara *middle power* di kawasan terdekat yaitu ASEAN yang juga memiliki irisan kepentingan dan hubungan politik ekonomi yang kuat dengan negara – negara di Asia Timur.

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Dalam hal ini salah satu wujudnya adalah *New Southern Policy* yang merupakan bentuk restrukturisasi kebijakan luar negeri Korea Selatan untuk mendorong institusionalisasi kerja sama dengan aktor Asia Tenggara dan digunakan juga oleh Korsel untuk mencari sinergi normatif yang dapat memperkuat hubungan jangka panjang dengan mitra ASEAN yang memiliki rezim, mekanisme, dan prinsip yang dibutuhkan Korsel sebagai negara *middle power* dalam menyelesaikan masalah keamanan dan perdamaian. Penulis beranggapan penting untuk merangkul ASEAN dan negara lainnya yang dinilai memiliki peran dan sistematika yang sama dalam tataran normatif karena ASEAN contohnya, yang kuat akan prinsip non proliferasi nuklir, perdamaian, dan mengedepankan pendekatan konstruktif menjadi aset eksternal Korsel. Apalagi isu Korut juga di bahas dalam ASEAN Regional Forum (ARF) yang juga dihadiri secara reguler oleh Korea Utara merupakan kesempatan emas bagi Seoul.

Terakhir, penulis akan fokus pada restrukturisasi kebijakan luar negeri yang dialami Korea Selatan, penelitian sebelumnya banyak menekankan isu proliferasi nuklir Korea Utara sebagai muatan utama, dan penulis sependapat dengan hal demikian. Apa yang menjadi perhatian Seoul sebenarnya adalah situasi negaranya bersama Korea Utara yang memprihatinkan dan bukanlah isu global. Korsel menurut penulis hanya menggunakan isu global sebagai alat untuk mendorong perhatian internasional kepada Korea Utara. Penelitian ini meyakini bahwa restrukturisasi kebijakan luar negeri Korea Selatan memang melibatkan mobilisasi pengaruh dan pendekatan – pendekatan strategis dalam tatanan multilateral dalam berbagai lini dan forum baik yang berasal dari arsitektur Asia Timur maupun yang bukan berasal dari Asia Timur, namun muatannya sama, yaitu bagaimana mereka bisa menemukan sinergi dengan mitranya masing – masing. Korea Selatan dinilai pada penelitian sebelumnya sebagai *middle power* yang berhati – hati, pendirian ini memang sejatinya cocok dengan posisi Indonesia yang terus mengedepankan bebas aktif dan non intervensi namun tetap secara aktif berkontribusi konkret pada tataran multilateral.

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Status Korsel sebagai *middle power* yang berhati – hati tersebut merupakan hasil dari proses pembentukan, identifikasi, dan pendewasaan tataran normatif dari kebijakan politik luar negeri Korsel pasca perang dingin dan pasca terbentuknya konstelasi politik rivalitas dengan Jepang dan Tiongkok. Studi sebelumnya berpendapat bahwa Korsel terus berhati – hati karena konflik yang dihadapinya sebagai negara *middle power* akan konsekuensi dari hubungan kompleks dan pembelahan lini kerja sama ekonomi dan politik serta situasi keamanan Semenanjung Korea yang termanifestasi dalam postur diplomasi membangun jembatan (*bridgebuilding*) dengan ambiguitas strategis terhadap Korut, Tiongkok, Jepang, dan interkoneksi dengan inisiatif minilateral seperti Quad, AUKUS, dan lainnya (Abbondanza, 2022). Sikap hati hati ini juga sebenarnya relevan dengan konteks pembahasan sebelumnya pada bagian penelitian ini, yaitu terkait ARF, di mana kehadiran Korut di ARF memberikan kemudahan bagi Korsel untuk melakukan induksi norma perilaku non proliferasi kepada Korut di situasi yang lebih netral ketimbang melalui *Inter Korean Summit* yang masih rawan akan penetrasi sentimen pihak asing. ARF memberikan ruang dan *confidence* yang dibutuhkan untuk Korsel dan Korut untuk melakukan *candid dialogue* akan non proliferasi dengan modalitas forum yang dipimpin oleh norma ASEAN.

Penulis beranggapan bahwa melalui ARF akan ada persepsi positif kepada Korut bahwa tidak ada kemunafikan karena sejatinya pembahasan non proliferasi integral dengan norma ciri khas ASEAN dan bukan suatu yang dibentuk oleh AS. Hal ini dapat dibuktikan dari *institutional memory* ASEAN yang dibentuk oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk mendorong kesejahteraan dan navigasi perang dingin. Studi sebelumnya terkait hal ini menyampaikan pandangannya bahwa ARF lebih memberikan hasil yang menjanjikan ketimbang *Six Party Talks* dan terus mendorong konstruksi positif ketimbang *carrot or stick* semata yang terus di gaungkan oleh negara barat pada *Six Party Talks* (Akhli, 2019). Walaupun demikian, ada PR bersama di mana ARF memang tidak memiliki modalitas yang cukup kuat untuk menghasilkan keputusan yang mengikat Korut dan hanya berfungsi sebagai medium dialog di situasi

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

yang lebih netral, namun ARF di pandang Korut sebagai manfaat baik untuk berdialog dan sebagai forum untuk artikulasi *role conception* negara mereka yang selama ini terus ditekan dan isolasionis (Ballbach, 2017)

Tentunya penulis pada konteks DK PBB yakin bahwa navigasi Korsel sebagai *middle power* dalam konteks restrukturisasi kebijakan luar negerinya akan terus fokus pada variabel dependen dan independen dari restrukturisasi kebijakan luar negeri. *Role conception* masih menjadi muatan utama, karena Korsel dan Jepang juga merupakan negara Asia Timur yang secara multilateral dekat dengan AS namun dalam hal ini terus mendorong cara cara konstruktif lain secara unilateral dan regional. Hal ini sendiri menurut penelitian sebelumnya penting, karena kawasan Asia Timur dan Asia Timur Laut tidak memiliki fora multilateral sehingga jalur PBB dan non PBB penting untuk digunakan sebagai jalur interaksi diplomasi *middle power* terkait isu keamanan dan politik Asia Timur (Kim S. , 1998).

2. Studi Kasus Kelompok ASEAN: Malaysia dan Vietnam

Pada kelompok ini, Malaysia dan Vietnam merupakan kedua negara yang pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB yang lebih aktif berpartisipasi pada isu di kawasan dan perdamaian global. Kedua negara dalam hal ini menggunakan ASEAN sebagai salah satu faktor utama yang menjadi referensi posisinya ketika disampaikan dalam forum multilateral seperti DK PBB. Dalam pembahasan di bagian ini, penelitian menemukan berbagai kesimpulan penting seperti persepsi suatu negara terhadap isu kawasan yang mempengaruhi restrukturisasi kebijakan luar negerinya. Peran kedua negara dan netralitas serta tumbuhnya ambisi Malaysia dan Vietnam dijadikan pengukuran dalam penelitian ini untuk melihat proses restrukturisasi kebijakan luar negeri yang melibatkan negara *middle power* yang tidak setua Indonesia dan lainnya dalam hal keaktifan di tataran global.

a. Malaysia

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Malaysia merupakan salah satu negara ASEAN yang sudah beberapa kali berkesempatan menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada tahun 1965, 1989 – 1990, 1999 – 2000, dan 2015 – 2016. Malaysia dalam hal ini juga menjadi negara yang memiliki pendirian yang cukup mirip dan beberapa kali sinergis dengan posisi Indonesia dalam isu kawasan. Malaysia sendiri menurut Kementerian Luar Negerinya fokus pada isu Palestina, konflik di Timur Tengah, dan isu yang menjadi pembahasan. Namun, berbeda dengan Korea dan Jepang yang di bahas penulis sebelumnya yang membawa keanggotaan mereka kental dengan kepentingan kawasan. Malaysia sendiri cukup pragmatis dan terus mendorong reformasi DK PBB seperti pengaturan veto yang di vokalkan Malaysia agar adanya penggunaan veto yang transparan, akuntabel, dan menghindari veto yang tidak demokratis yang tertuang pada resolusi SMU PBB 76/262 yang di dukung oleh Malaysia (New Strait Times, 2022). Resolusi SMU PBB ini mengatur bahwa setelah sebuah veto dilakukan, negara yang melakukan veto harus menjelaskan alasan mereka dan SMU PBB akan bertemu 10 hari pasca veto tersebut untuk membahas situasi dari muatan isu yang tertuang dalam draf resolusi yang di veto tersebut (Zee, 2022). Keanggotaan Malaysia di DK PBB tentu menjadi salah satu bukti bahwa Malaysia sendiri memiliki kebijakan luar negeri yang cukup mengedepankan identitas dan norma kawasan sebagai posisi dasar Malaysia pada forum multilateral termasuk DK PBB itu sendiri. Penelitian sebelumnya yang melandaskan bahwa polugri Malaysia fokus pada karakter pragmatis dan terus mendorong kohesivitasnya dengan substansi yang tertuang di Piagam PBB (Selat, 2006). Malaysia berbeda dengan Indonesia yang di mana Indonesia di kenal sebagai negara dengan identitas diplomasi yang kuat yaitu Bebas Aktif sedangkan Malaysia tidak memiliki prinsip khas sedemikian rupa, sehingga postur kebijakan luar negeri Malaysia akan senantiasa membutuhkan referensi dari tataran normatif kawasan dan perjanjian internasional. Sedangkan, Malaysia terus juga mengkarakterisasi kebijakan luar negerinya pada nilai pluralisme yang membentuk mosaik negara bangsa dalam sistem internasional (Albar, 2005).

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Proses restrukturisasi kebijakan luar negeri Malaysia sendiri di mulai dengan *benchmark* ketika Malaysia di era tahun 1950-an masih fokus pada kebijakan pro Barat yang kemudian berubah menjadi kebijakan luar negeri non blok pada tahun 1970 pada masa pemerintahan Tun Razak, yang kemudian di baharui lagi pada masa pemerintahan Mahatir pada tahun 1981 yang terus mengedepankan polugri Malaysia di bawah kontrol ketat pemerintahannya (Teik, 1995). Dari dasar- dasar ini, yang kemudian di mana kita tiba pada kepemimpinan saat ini di era tahun 2022 pasca pandemi COVID-19, kebijakan luar negeri Malaysia terus memperdalam fokusnya pada isu kawasan, walaupun tidak ada hal yang bisa di kaji dari sini karena ini terjadi pasca keanggotaan Malaysia di DK PBB tahun 2015 hingga 2016. Isu Indo Pasifik terus menjadi salah satu fokus sorotan kebijakan luar negeri Malaysia, walaupun menurut penulis hal ini masih cenderung *mirroring* dari apa yang terus dilakukan Indonesia sebagai aktor penting di kawasan. Malaysia dalam isu Indo Pasifik dalam studi sebelumnya masih dinilai sebagai suatu negara yang masih memiliki pendirian netral dan terus mendorong partisipasi yang cukup tenang dan terus mengedepankan cara yang tidak konfrontatif, hal ini dikarenakan Malaysia sadar akan integrasi mereka dengan kedua pihak AS dan Tiongkok baik secara strategis maupun ekonomi (Krishnan, 2020).

Namun, posisi Malaysia pada penelitian yang sama dijelaskan masih cenderung tentatif dan memiliki postur “*wait and see*” yang menurut penulis terjadi dikarenakan Malaysia masih terus netral dan meredam sentimen negatif terhadap para negara adidaya dalam realisasi polugrinya. Namun, secara umum Malaysia masih terus mendorong sentralitas dan narasi yang disepakati oleh ASEAN dalam perkembangan isu keamanan, walaupun demikian, ancaman seperti marjinalisasi kredibilitas dan pengaruh Malaysia masih akan terjadi apabila mereka memperpanjang postur kebijakan luar negeri yang “*wait and see*” dalam waktu berkepanjangan (Krishnan, 2020). Analisis lainnya seperti dari Lowy Institute juga merasa bahwa perubahan dalam realisasi kebijakan luar negeri Malaysia kedepan masih akan membutuhkan

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

proses konsultatif yang kuat dalam tataran domestik antar para pembuat kebijakan di Malaysia dikarenakan pragmatisme dan *wait and see* ini masih menjadi ciri khas Malaysia (Noor, 2019).

Sebelum masuk dalam konteks keanggotaan tidak tetap Malaysia di DK PBB, penulis ingin membahas lebih lanjut beberapa elemen dan faktor penting yang menjadi perhatian ketika memahami restrukturisasi kebijakan luar negeri Malaysia. Dalam hal ini tentu Malaysia akan terus mendorong pembangunan citra nasional sebagai negara yang bersahabat dengan negara manapun sambil mendorong legitimasi terhadap rezim yang mengakomodasi hal ini bagi Malaysia (Alatas, 2021). Selain daripada elemen pembangunan citra nasional tersebut, perlu di pahami juga bahwa Malaysia dalam perubahan kebijakan luar negerinya terus mengedepankan pendekatan tradisional berbasis sejarah nasional mereka sendiri, yang dinilai dalam studi sebelumnya di refleksikan pada posisi Malaysia di era kontemporer saat ini (Chwee, 2012). Berikutnya, menurut penulis, Malaysia mengambil peran sebagai *advocator* apabila kita memandangnya dari kacamata operasionalisasi kerangka pemikiran negara *middle power* sebelumnya. Dalam hal ini tentu sebagai sebuah *advocator*, Malaysia mengedepankan konstruktivisme dalam paradigma kebijakan luar negerinya untuk mengedepankan *soft power* (Hidayatullah, 2017).

Walaupun menurut penulis, Malaysia sendiri cukup ambigu dalam memahami restrukturisasi kebijakan luar negerinya dalam garis besar karena posisi Malaysia yang abu – abu namun aktif. Hal ini membuat *role conception* dari Malaysia tidak menghasilkan arah spesifik dan masih cenderung fokus pada prinsip – prinsip umum normatif yang disepakati secara bersama oleh komunitas internasional. Berikutnya, perlu di ketahui bahwa perubahan kebijakan luar negeri Malaysia dipengaruhi secara langsung oleh faktor gaya dan latar belakang kepemimpinan negara yang tentunya beriringan dengan perubahan eksternal dan internal yang kemudian menimbulkan perubahan kebijakan luar negeri (Erdiatulha, Karjaya, & Rizki, 2020). Namun, kebijakan luar negeri Malaysia walaupun berubah di era setiap pemimpin, tetap harus

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

tetap mendorong adanya kesinambungan prinsip dan acuan norma termasuk terus secara aktif mendorong pandangan Malaysia agar di terima di berbagai tempat di mana mereka tidak menjadi anggota (Idris, 2020). Dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi kebijakan luar negeri Malaysia ditujukan untuk membangun citra negara sambil memainkan peran *middle power* Malaysia sebagai *advocator* namun dengan arah yang tidak spesifik karena Malaysia cenderung pragmatis dan *wait and see* dalam kebijakan luar negerinya. Namun kepastian yang bisa ditarik dalam diskursus restrukturisasi kebijakan luar negeri Malaysia adalah, bahwa negara ini terus berubah dalam gaya diplomasinya namun muatan yang berubah tersebut terus akan mengacu pada prinsip dasar Malaysia sebagai negara yang pragmatis, turunan turunan aksi kebijakan luar negeri Malaysia di pengaruhi oleh gaya kepemimpinan namun terus tetap mengedepankan sinergi prinsip ASEAN sebagai salah satu identitas penting dari polugri Malaysia. Namun, tentunya juga selain daripada bicara prinsip dan aksi, Malaysia masih memiliki tantangan di mana negara tersebut masih memiliki banyak pekerjaan untuk memperbaiki formulasi respons Malaysia terhadap isu internasional, serta bagaimana Malaysia dapat mendorong penciptaan budaya politik yang dapat mendorong kebijakan luar negeri yang efektif dengan fungsional para aktor kebijakan secara optimal dalam memperdalam adaptasi Malaysia di dunia yang berubah (Jafar & Rahman, 2020).

Dalam konteks keanggotaan tidak tetap Malaysia di DK PBB, dapat di pahami bahwa selain dari pada Malaysia mengedepankan nilai dan prinsip normatif dalam piagam PBB sebagai landasan, Malaysia juga mengutamakan pentingnya untuk mendorong sinergi dengan ASEAN secara institusional dan mendorong agar ASEAN memiliki ruang untuk kerja sama regional di kembangkan secara fleksibel, responsif, dan adaptif dengan isu keamanan yang lebih kompleks yang biasa di bahas di forum multilateral (Wah & Jumrah, 2017). Malaysia memiliki posisi yang cukup mirip dengan Indonesia pada isu Timur Tengah, di mana Malaysia terus mendorong perdamaian dan mendorong adanya aksi untuk menghormati hukum dan kesepakatan

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

yang telah di implementasikan; mendorong bantuan untuk diberikan pada negara yang berkonflik; mendorong operasi perdamaian dan membangun kepercayaan antar pihak; dan bersinergi pada pandangan normatif negara lainnya dalam mekanisme penyelesaian konflik yang diajukan oleh DK PBB pada isu di Afrika, Timur Tengah (termasuk isu Palestina), dan isu Haiti melalui pendirian pemerintahan transisi yang disepakati bersama anggota DK PBB lainnya. Keanggotaan tidak tetap Malaysia di DK PBB pada tahun 2015 – 2016 menurut penelitian yang mengkaji ini sebelumnya menunjukkan bahwa Malaysia terus mendorong materialisasi kapabilitas kekuatan yang relatif bersama dengan negara – negara *likeminded* (Hamid, 2020). Hal ini menjadi pola perilaku Malaysia selama keanggotaannya di DK PBB dan menurut penulis material kapabilitas kekuatan relatif tersebut juga terbentuk dalam sesuatu proses yang dipandu dan sangat erat dengan prinsip kebijakan luar negeri Malaysia yang pragmatis dan menyadari keterbatasannya. Pada penelitian tersebut, disebutkan beberapa isu penting seperti Palestina, di mana Malaysia sendiri terus mendorong pentingnya menyadari kewajiban moral akan kemerdekaan Palestina, terus mendorong navigasi politik pada mekanisme informal DK PBB, dan mengedepankan narasi pentingnya membedakan posisi unilateral yang produktif dan kontraproduktif pada isu Palestina, namun Malaysia walaupun demikian tidak melakukan *name calling* aktor – aktor tertentu (Hamid, 2020).

Hal ini kembali membuktikan argumen penulis sebelumnya, bahwa Malaysia netral dan berusaha menjaga agar tidak ada sentimen negatif yang dijatuhkan atas dirinya. Hal ini merupakan salah satu wujud bahwa perubahan dan struktur kebijakan luar negeri Malaysia secara fundamental masih sama walaupun secara situasional termaterialisasi dalam aksi – aksi yang berbeda dari waktu ke waktu. Selain Palestina, Malaysia juga fokus pada isu reformasi DK PBB untuk menghasilkan keputusan dan resolusi konkret serta mampu mewujudkan perlindungan bagi para anak – anak yang terdampak konflik. Menurut penelitian yang mengkaji keanggotaan Malaysia, hal ini penting karena Malaysia terus mendorong pandangan yang dinilai penting walaupun

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

mereka terbatas pada fungsionalitas diplomasinya karena bukan merupakan negara dengan posisi kunci. Dibandingkan dengan Indonesia, memang betul Malaysia sejajar dengan posisi Indonesia dalam berbagai isu penting DK PBB seperti Palestina, namun Indonesia memiliki materialisasi kepemimpinan yang lebih kuat ketimbang Malaysia, sehingga restrukturisasi kebijakan luar negeri yang dilakukan Indonesia mungkin akan lebih membutuhkan proses yang lebih adaptif ketimbang apa yang dilakukan Malaysia melalui proses yang lebih konsultatif.

b. Vietnam

Vietnam merupakan anggota tidak tetap DK PBB yang sebelumnya juga menjabat di era keanggotaan tidak tetap Indonesia dan selesai satu tahun setelah Indonesia. Vietnam terakhir menjabat pada tahun 2020 – 2021 dan sudah dua kali menjabat, adapun dalam hal ini Vietnam mendorong partisipasi mereka berdasarkan posisi nasional yang di umumkan oleh Kemlu Vietnam sebagai negara yang mendorong kemerdekaan, ketahanan diri, promosi kerja sama, dan mendorong diversifikasi hubungan antar negara termasuk mendorong pentingnya tanggung jawab negara pada mekanisme multilateral *vis-a-vis* DK PBB (VLLF, 2022). Vietnam menempatkan ASEAN juga sebagai salah satu posisi penting dalam pembahasan DK PBB yang berujung pada satu resolusi terkait organisasi regional, serta isu lain seperti Libya, perlindungan anak, dan mendorong penyelesaian konflik secara damai melalui dialog pada berbagai kesempatan. Dalam konteks status Vietnam sebagai negara *middle power*, Hanoi terus mendorong usaha Vietnam sebagai *middle power* yang sedang bertumbuh baik secara domestik maupun internasional melalui usaha konsisten yaitu diversifikasi dan multilateralisasi hubungan luar negerinya serta bekerja sama dengan posisi kebijakan yang *outward looking* (melihat keluar) (Do, 2022). Selain itu posisi kebijakan luar negeri Vietnam terus berangkat dari dasar untuk konsolidasi perdamaian dan mempromosikan kerja sama antar negara yang bermanfaat dengan postur demokratis. Hal ini tentu dilakukan atas dasar restrukturisasi kebijakan luar

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

negeri Vietnam yang menurut penulis juga dilakukan karena sistem pemerintahannya yang bersifat komunis. Seperti yang kita tahu, negara komunis merupakan negara yang pada catatan sejarahnya, menjadi fokus rivalitas pada perang dingin, sehingga untuk bertumbuh sambil mempertahankan sistem pemerintahannya, perlu dilakukan adaptasi dan perubahan struktur kebijakan luar negerinya.

Pertama, restrukturisasi kebijakan luar negeri Vietnam bergantung pada bagaimana negara tersebut melakukan manifestasi status *middle power* di kawasan. Dalam hal ini Vietnam terus mendorong posisi negaranya dalam tataran regional dengan preferensi multilateralnya dan terus mendorong pentingnya keseimbangan relasi dengan negara adi daya. Posisi Vietnam ini cukup unik mempertimbangkan negara ini sendiri juga terus mendorong peningkatan peran ASEAN dalam tatanan global serta mendorong posisinya agar tidak menjadi proksi negara besar sebagai suatu mitigasi konflik dan potensi tantangan geopolitik dan keamanan (Ha & Le, 2021). Kedua, restrukturisasi kebijakan luar negeri Vietnam sebagai negara *middle power* mengedepankan pentingnya kebutuhan dan pencapaian integrasi global, hal ini di pandang penting sebagai usaha Vietnam untuk mencapai kestabilan yang tentunya merupakan narasi liberal (Turner, 2014). Cara stabilisasi ini terus diperdalam Vietnam melalui kebijakan luar negerinya yang bersifat *multidirectional* atau multi arah, di mana kebijakan ini menekankan pentingnya untuk membangun teman dan jejaring kebijakan luar negeri yang terus mendorong keterlibatan positif di tengah tatanan global yang multipolar dan kompleks untuk mengatasi ketidakpastian (Chapman, 2017). Hal ini dilakukan juga dalam manifestasi posisi Vietnam pada kerja sama multilateral, di mana Vietnam terus menjaga posisinya agar setiap tindakan unilateral dibatasi dan memastikan adanya kepemimpinan dalam menyelesaikan permasalahan yang integral dengan kebutuhan akan pentingnya memanfaatkan situasi multipolar untuk meraup manfaat (Chapman, 2017).

Hal ini merupakan ruh dari *multidirectional foreign policy* yang dianut Vietnam itu sendiri, yang menurut penulis, memberikan kenyamanan bagi Vietnam untuk

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

berinteraksi dan menempatkan dirinya pada forum multilateral dalam menyelesaikan ketidakamanan global melalui DK PBB. Hal ini menurut penulis merupakan sesuatu yang *earned* sehingga membawa kita kepada pemahaman, bahwa restrukturisasi kebijakan luar negeri *middle power* Vietnam dilakukan karena kebutuhannya untuk mengedepankan *safeguard* bagi kepentingan nasionalnya agar manfaat dari kerja sama internasional bisa tercapai. Serta, kita juga melihat bahwa *role conception* Vietnam di bangun bukan karena ambisi semata, tetapi adalah karena Vietnam sadar akan kompleksitas global sehingga perlu ada pengelolaan situasi dan resiko yang baik melalui diplomasi multilateralnya. Hal ini menurut penulis terjadi karena Vietnam harus melakukan perubahan kebijakan luar negeri untuk menghindari jebakan yang terjadi dari dilema antara kebutuhan untuk membangun kemandirian Vietnam dan pentingnya untuk mendorong integrasi yang proaktif pada tatanan internasional. Hal ini pada studi sebelumnya dinilai terjadi karena Vietnam betul – betul merasa situasinya terancam, terutama pada era kepemimpinan Do Moi di mana Tiongkok terus melakukan aksi unilateral di Laut Cina Selatan, serta kebutuhan untuk membangun kemandirian akibat bergantung pada situasi dan mitra lokalnya di kawasan untuk keamanannya; dan implementasi *Open Door Policy* pada era Do Moi yang membuka negaranya yang terjadi sejak tahun 1980 – 1990an untuk bangkit dan menggunakan kebijakan luar negeri sebagai alat transformasi nasional (Thu, 2018).

Lebih lanjut dalam konteks keanggotaan tidak tetap Vietnam sebagai E-10 di DK PBB, Hanoi percaya bahwa negaranya terus mendorong peran mereka sebagai negara *middle power* untuk mendorong pengembangan objektif perdamaian dan keamanan internasional sambil melakukan penghormatan terhadap hukum internasional, memperkuat struktur kerja sama multilateral, dan memperkuat institusionalisasi PBB dalam solusi global (Jha, 2022). Namun tentunya, menurut penulis, restrukturisasi kebijakan luar negeri masih akan terus terjadi dan tidak akan sama dengan apa yang terjadi saat ini, hal ini dikarenakan semakin bertumbuhnya Vietnam sebagai *middle power* yang mencari kedewasaan (maturitas) dalam kebijakan

Hino Samuel Jose, 2022
***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

luar negerinya, maka Vietnam harus terus melakukan penyesuaian perilaku untuk dapat meraih status *middle power* (Le, 2019). Terkait status ini tentu akan relevan pada konteks *assembler*, *enforcer*, dan *advocator*. Vietnam menurut penulis berpotensi untuk menjadi *enforcer* karena dibanding Malaysia, Jepang, dan Korsel, Vietnam punya kapasitas yang lebih kuat karena relevansinya yang semakin meningkat pada level multilateral. Hal ini termasuk pendekatan vietnam untuk mempromosikan stabilitas dan keinginan mereka untuk memimpin mediasi konflik internasional (Le, 2019). Hal ini digambarkan oleh penulis karena pada saat penelitian ini dibuat, Vietnam masih merupakan negara dengan kapasitas *middle power* yang masih bertumbuh. Vietnam juga merupakan negara *mainland* ASEAN yang potensial untuk mengambil kepemimpinan subregional Mekong dengan mengedepankan nilai sentralitas ASEAN, dikarenakan Mekong cepat atau lambat akan menjadi area kontestasi negara besar nantinya. Untuk kesimpulan, maka dalam perspektif restrukturisasi kebijakan luar negeri, posisi Vietnam akan senantiasa untuk melakukan ekspansi dan mobilisasi modalitas ASEAN sebagai landasan kebijakan luar negerinya. Hal ini dikarenakan sebagai negara yang berminat dan terus bermain aktif, Vietnam menawarkan dirinya menjadi pemain tambahan di saat negara kunci ASEAN seperti Indonesia dan Malaysia sedang menyelesaikan permasalahan internal mereka, sehingga menjadikan Vietnam bermain pada diplomasi multilevel sambil meningkatkan kapabilitas fungsionalnya sebagai *emerging middle power* (Tinh, 2021). Oleh karena itu tentu restrukturisasi kebijakan luar negeri berkuat pada peningkatan kapasitas Vietnam dan dilakukan melalui realisasi aktivisme kebijakan luar negeri Vietnam pada berbagai mekanisme multilateral dan regional.

Tentunya hal ini akan membutuhkan aktivasi, dan menurut penulis aktivasi ini sangatlah mungkin karena Vietnam memiliki otonomi kebijakan luar negeri dan posisi yang jelas dan terarah di kawasan tanpa bergantung sepenuhnya pada relasi mereka dengan negara eksternal yang menjamin keamanan mereka. Hubungan konstruktif terus ditingkatkan dalam level bilateral untuk meningkatkan signifikansi dan relevansi

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

mereka pada tatanan multilateral sambil membangun jembatan antar negara (Tinh, 2021).

B. Analisis Konvergensi

Pada bab ini penulis akan fokus pada tiga konvergensi utama yang mempengaruhi restrukturisasi kebijakan luar negeri negara *middle power* dari empat contoh negara di atas yang digambarkan di bawah ini untuk diperhatikan dalam pembahasan berikutnya. Ketiga area konvergensi ini merupakan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dari empat negara tersebut dalam proses mereka sebagai negara *middle power* berpartisipasi dalam pembahasan isu keamanan global di forum multilateral. Dalam hal ini analisis konvergensi ditujukan untuk mengumpulkan tiga area konvergensi utama yang akan menjadi dasar dari pembahasan karakter kebijakan negara *middle power* seperti Indonesia apabila dibandingkan dengan ASEAN terutama dalam isu DK PBB. Gambar 5 dibawah ini akan di bahas secara mendalam pada bagian – bagian setelahnya pada bab penelitian ini.

Gambar 5. Ilustrasi Area Konvergensi Restrukturisasi Kebijakan Luar Negeri Negara *Middle Power*



Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Sumber: Diolah oleh penulis

a. Otonomi Dalam Mengelola Proses Kebijakan Luar Negeri dan Ketergantungan

Berbicara terkait otonomi tentu hal yang paling relevan adalah bagaimana otonomi dihadirkan sehingga negara memiliki opsi kebijakan luar negeri yang dapat proaktif mempertahankan kepentingannya. Otonomi dalam mengelola kebijakan luar negeri tanpa pengaruh asing niscaya menjadi hak semua negara karena otonomi penting dalam menghadapi batasan dan tekanan dari struktur sistem internasional yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional aktor negara (Andres, 2016). Studi yang mendekati konteks ini salah satunya berbicara pada keberadaan otonomi dalam proses implementasi kebijakan luar negeri negara Eropa. Dalam studi tersebut, disimpulkan bahwa otonomi hanya akan tercapai apabila terdapat struktur yang dapat mendemonstrasikan otonomi aktor di dalam birokrasi negara secara substansial serta keadaan geografis negara tersebut (Henokl & Trondal, 2015). Studi sebelumnya juga meninjau otonomi sebagai sesuatu keadaan di mana negara berusaha untuk menciptakan ruang yang cukup untuk menyusun kebijakannya sendiri dan tidak hanya melaksanakan mandat yang di tetapkan oleh otoritas – penelitian ini sendiri menaruh muatan kuat akan perhatian negara Bumi bagian selatan (Miguez, n.d.).

Otonomi negara dalam mengelola hubungan luar negerinya dalam kacamata restrukturisasi kebijakan luar negeri tentu berfokus pada bagaimana negara dapat mengambil aksi baik yang berjenis tindakan isolasi, bergantung pada negara lain, tindakan untuk meningkatkan kemandirian, dan diversifikasi hubungan luar negeri. Lebar sempitnya ruang otonomi luar negeri suatu negara tentu bermakna beberapa hal menurut penulis: (1) Bagaimana suatu negara memiliki kebebasan ataupun kemudahan dalam melakukan diversifikasi hubungan luar negerinya dengan aktor lain tanpa harus memperoleh “restu” dari negara yang mereka bergantung; (2) suatu negara mampu

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

untuk menyatakan posisinya berdasarkan keinginannya dalam isu – isu global tanpa harus *bandwagoning* dengan negara besar; (3) Suatu negara mampu untuk melakukan aksi kebijakan luar negeri termasuk melakukan *dual engagement* untuk melaksanakan perannya dalam isu – isu dan media kerja sama internasional; (4) tingkat ketergantungan negara dengan aktor asing tertentu dalam penyelesaian ancaman yang dihadapinya; dan (5) otonomi untuk melakukan perubahan kebijakan luar negeri yang tidak hanya reaktif tetapi juga adaptif dan proaktif. Hal ini penting mengingat kemandirian suatu negara dalam mengelola kebijakan luar negerinya merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur proses restrukturisasi kebijakan luar negeri negara dalam berbagai lini, termasuk dalam lingkup multilateral seperti apa yang dilakukan di DK PBB. Penulis menyatakan bahwa kelima hal ini merupakan suatu bentuk sinergi antara diskursus *role conception* suatu negara dalam kebijakan dan status politik luar negerinya dengan keinginan/ ambisi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, yang umumnya juga muncul di kawasan yang kemudian didorong untuk memobilisasi atensi global untuk hal tersebut diselesaikan melalui jalur multilateral, ataupun sebaliknya menyelesaikan isu global dengan pendekatan regional.

b. Dinamika Ancaman dan Kerja Sama Terhadap Isu Kawasan

Dinamika isu kawasan akan terus menjadi perhatian negara *middle power* dalam melakukan restrukturisasi kebijakan luar negerinya. Kerangka berpikir terkait hal ini sudah dibahas pada bagian sebelumnya, namun penulis ingin memperdalam terkait pada konteks ke empat negara yang dikaji sebelumnya. Pertama, untuk Jepang kita melihat bahwa isu isu yang menjadi perhatian di kawasan dalam cakupan geopolitik seperti Quad, agresi Tiongkok di LCS, dan konflik antara Jepang dan Tiongkok menjadi elemen penting dalam prioritas keanggotaan Jepang di DK PBB utamanya pada tahun 2023 – 2024 mendatang. Perlu diketahui bahwa narasi promosi *rules based international order* yang dituangkan oleh Kemlu Jepang sejalan, tegak lurus, dan berangkat dari apa yang terjadi di Indo Pasifik dalam konteks rivalitas geopolitik. Terdapat keinginan Jepang untuk secara lebih konstruktif dan lebih dalam

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

lagi membawa isu ini sebagai perhatian khusus DK PBB yang tentunya akan disesuaikan dalam manifestasi posisi Jepang selama keanggotaan tidak tetap DK PBB nanti. Kedua untuk Korea Selatan, di mana isu proliferasi nuklir Korut terus menjadi agenda prioritas keanggotaan Korsel di DK PBB karena isu Korut sudah sangat mendalam dan *embedded* dalam arsitektur keamanan global. Pendekatan/restrukturisasi kebijakan luar negeri Korsel yang berubah di bawah kepemimpinan yang baru tentu akan menentukan bagaimana Korsel mengajak masyarakat internasional melakukan pendekatan dan melakukan mobilisasi tekanan kepada Korut untuk mengurangi ambisi dan mendorong total denuklirisasi Semenanjung Korea; baik secara asertif, akomodatif, maupun agresif. Kemudian untuk Malaysia dan Vietnam, bahwa isu yang menjadi perhatian ASEAN akan terus menjadi posisi dasar dalam proses pengaturan norma yang dilakukan kedua negara di DK PBB selama masa keanggotaan tidak tetapnya.

Ada beberapa hal yang dipetik penulis dari hal ini: (1) bahwa isu regional sangat dan akan terus relevan sebagai komponen penting yang mendorong/ menjadi pertimbangan perubahan kebijakan luar negeri suatu negara; (2) bahwa isu kawasan menjadi perhatian penting bagi negara ketika mereka berinteraksi, melakukan mobilisasi sumber daya, dan membentuk pandangan mereka dalam mengajak mitra mereka untuk bekerja sama/ terlibat dalam pembahasan isu – isu regional tersebut di fora multilateral *vis-a-vis* DK PBB; dan (3) bahwa isu kawasan menjadi arena untuk materialisasi *role conception* para negara *middle power* ketika mereka berpartisipasi aktif pada isu keamanan internasional termasuk saat melalui DK PBB. Pengambilan peran negara *middle power* sendiri dan bagaimana mereka berkontribusi pada tata kelola global juga sangat koheren pada kasus regional yang mereka hadapi karena pengaruh dan basis fundamental yang mereka bawa ke forum multilateral berasal dari isu regional yang mereka hadapi (Onis, 2017).

c. Politik Domestik dan Faktor Kepemimpinan dan Kaitannya dengan

Isu Kawasan

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Faktor kepemimpinan (*leadership*) tentu jelas berpengaruh pada kebijakan luar negeri suatu negara, termasuk pada isu seperti bias dan faktor psikologis suatu pemimpin negara yang dikombinasikan dengan ancaman – ancaman yang dihadapi para pemimpin negara tentu akan berdampak baik secara optimal maupun suboptimal dalam polugri suatu negara (Lebow, 1981). Dalam contoh Korsel, Jepang, dan Malaysia aktor pemimpin menjadi bagian penting dalam perhitungan, yang tentunya juga dengan preferensi yang berbeda – beda, maka restrukturisasi kebijakan luar negeri negara – negara *middle power* tersebut, termasuk di DK PBB akan sangat ditentukan dari bagaimana suatu pemimpin memandang baiknya suatu isu diselesaikan/ dipandang/ didekati. Penulis beranggapan bahwa apa yang berada dalam kaca mata pemimpin negara terkait masalah yang dihadapi di kawasan akan menentukan bagaimana narasi/ prioritas kebijakan luar negeri itu sendiri ditentukan. Kita belajar banyak dari Jepang dan Korsel pada sebelumnya, di mana gaya kebijakan luar negeri yang berbeda beda dari periode ke periode akan menentukan bagaimana derajat tindakan yang diambil suatu negara. Contoh ketika partai Liberal di Jepang berkuasa, maka akan terus mendorong peningkatan kemandirian Jepang dan mengambil pendekatan yang lebih konstruktif dalam menyelesaikan berbagai masalah seperti nuklir Korut dan lainnya. Sementara, apabila partai konservatif berkuasa, maka Jepang akan nasionalis dan akan lebih asertif dan berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan dan dukungan aktor asing. Hal ini juga terjadi di Korsel di mana pada Presidensi Moon Jae In Korea Utara masih bisa menghela nafas dengan bantuan – bantuan yang diberikan dan pelaksanaan dialog Korut – Korsel berjalan, dan bahkan dibuktikan secara simbolis dengan pertemuan bilateral kedua pemimpin. Sementara, ketika Presiden Yoon Seok Yeol berkuasa, pendekatan Korsel terhadap Korut semakin tajam dan cenderung mengambil kebijakan yang lebih keras dan mengutamakan sinergi dengan AS yang berujung pada peningkatan rudal nuklir. Termasuk juga pada Malaysia ketika Malaysia di bawah pimpinan Tun Mahatir, Malaysia mengalami reformasi dalam memandang arti strategis posisinya di ASEAN dan bagaimana

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Malaysia harus berpartisipasi pada fora multilateral termasuk di DK PBB. Pada isu Korsel dan Jepang juga kita melihat bahwa kedua negara di DK PBB memiliki pendekatan yang unik, walaupun Korsel cenderung proaktif dengan isu nuklir Korut dibanding Jepang yang memiliki cakupan isu prioritas yang lebih luas. Hal ini membuktikan bahwa *leadership does matter, however what matter the most is how those leaders eventually perceive the issues happening nearby/ surrounding their countries*. Jadi tidak hanya dari kaca mata apa yang terjadi, tapi bagaimana pemimpin memandang hal itu, karena itulah yang akan menimbulkan watak kebijakan luar negeri yang mereka ambil dan menentukan dinamika yang terjadi setelahnya.

Menurut penulis ada lima kesimpulan yang bisa diambil terkait hal ini: (1) isu regional akan senantiasa semakin penting, terutama untuk para pemimpin negara *middle power*, karena yang mereka lihat terdekat adalah apa yang terjadi di halaman luar negara mereka, yang nantinya akan menentukan bagaimana mereka mengarahkan mesin diplomasi mereka untuk memposisikan dirinya di level multilateral; (2) Aktor pemimpin merupakan aktor yang memiliki keterbatasan dalam mengelola informasi, sehingga pembangunan narasi akan sangat berpengaruh dalam bagaimana mereka berpikir melawan batasan – batasan yang ada baik secara intelektual maupun secara riil; (3) umumnya perubahan sikap/ pembentukan sikap suatu aktor pemimpin juga terjadi karena tuntutan domestik baik dari partai, demo masyarakat, maupun lainnya sehingga faktor domestik memiliki derajat yang lebih tinggi karena biasanya menyangkut kepentingan politik yang lebih luas; dan (4) interpretasi pemimpin akan *role conception* negaranya sebagai *middle power* juga akan mempengaruhi bagaimana mereka memandang multilateralisme, norma internasional, penggunaan kekuatan, dan kegagalan suatu kebijakan luar negeri serta aksi – reaksi yang harus dibentuk (Brummer, 2016); dan (5) restrukturisasi kebijakan luar negeri yang dipimpin suatu aktor di dalam struktur pemerintahan akan menimbulkan sikap reaktif apabila mereka tidak siap dengan perkembangan isu tersebut/ kurang antisipasi; sikap adaptif apabila itu merupakan kelanjutan/ implikasi/ konsekuensi dari kebijakan yang mereka ambil di

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

masa lampau; dan sikap proaktif apabila isu tersebut memberi ruang bagi negara mereka untuk mengambil peran dan melakukan tindakan – tindakan kebijakan luar negeri yang diperlukan berdasarkan norma dan prinsip yang mereka pegang, dan bagaimana arsitektur internasional bisa mengakomodasi kepentingan tersebut dalam materialisasi sikap proaktif suatu negara yang dipimpin aktor itu.

Kemudian, penulis ingin menyinggung dari segi politik domestik setelah memahami faktor kepemimpinan. Proses pembentukan kebijakan luar negeri seperti apa yang kita analisis dari beberapa negara sebelumnya bergantung pada situasi domestik, hal ini dikarenakan tuntutan domestik, isu partisan, dan lainnya akan berpengaruh pada ratifikasi posisi suatu negara terhadap isu luar negerinya. Penulis tidak akan membahas kembali relasi politik luar negeri dengan proses restrukturisasi kebijakan luar negeri karena hal ini niscayanya sudah di bahas dalam kerangka teori penelitian ini, namun peneliti ingin membahas berangkat dari apa yang sudah di bahas pada bagian sebelumnya. Politik domestik tentu mempengaruhi pengaturan institusional dan rezim nasional yang akan mengatur bagaimana pelaksanaan kebijakan luar negeri sesuatu negara dilakukan untuk menjadi posisi pada isu tersebut. Contohnya adalah, di mana sistem pemerintahan dan mekanisme pengambilan kebijakan yang dilakukan akan mempengaruhi komitmen nasional dalam melaksanakan sesuatu norma dan pengaturan internasional (termasuk dari level multilateral seperti dari DK PBB yang menjadi fokus dari penelitian ini (Lantis, 2008; Kaarbo, 2018).

Dalam hal ini penulis ingin menggunakan kata intermestik (internasional dan domestik) yang merupakan istilah kunci yang sangat relevan dalam memahami politik dalam negeri dan kebijakan luar negeri negara. Dalam konteks perubahan kebijakan luar negeri, intermestik sendiri memiliki tiga pendekatan utama: (1) pendekatan domestik yaitu perubahan kebijakan yang dilandaskan pada kepentingan aktor – aktor domestik yang dalam proses politiknya berkaitan dengan pendekatan transnasional dan pendekatan intermestik; (2) kedua, pendekatan transnasional yang berfokus pada perubahan kebijakan yang diakibatkan oleh relasi ide – ide yang terbentuk dan

Hino Samuel Jose, 2022
***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dihasilkan oleh para aktor dan bagaimana ide tersebut mempengaruhi para aktor yang berkaitan dengan intermestik dalam proses yang bersifat kognitif; dan (3) pendekatan internasional yang berwujud dalam perubahan kebijakan yang dikarenakan adanya dinamika kepentingan aktor – aktor internasional yang secara proses politik terhubung dengan pendekatan transnasional dan intermestik (Kurniawati D. , 2012). Model ini menurut penulis sangat baik untuk melengkapi keterkaitan politik domestik dan konteks restrukturisasi kebijakan luar negeri. Di mana apabila kita simulasikan dalam konteks DK PBB, maka pendekatan domestik berguna untuk membangun posisi nasional kemudian pendekatan transnasional berguna untuk membantu perencanaan kebijakan dan ide – ide yang nantinya akan diambil menjadi keputusan dapat berdampak dan kemudian pendekatan intermestik yang menggabungkan semua hal dalam tatanan internasional yang lebih luas termasuk pada level multilateral seperti di DK PBB.

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]